BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Aksi Damai Bela Islam dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) DPW Surabaya

Aksi Damai Bela Islam adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di Indonesia, terutama di Kota Jakarta sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap menistakan agama dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu. Aksi ini terjadi sampai beberapa kali, karena pihak berwajib tidak segera merespon kasus yang dilakukan oleh Ahok. Aksi Damai Belas Islam merupakan peristiwa sejarah besar bagi Ummat Islam dan bangsa Indonesia. Dalam aksi damai tersebut, dihadiri kurang lebih 7 juta umat Islam ini tentu menggambarkan Ukhuwah Islamiyah yang sangat kental.

Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, pada akhir September lalu yang dinilai oleh sebagian besar umat Islam telah menistakan agama dengan melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 berbuntut panjang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian terkait polemik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang surat Al-Maidah. Dari hasil kajian tersebut MUI menilai pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51, menghina Al-Quran dan para Ulama.

Ketua MUI Maruf Amin menjelaskan, penghinaan itu karena Ahok menyebut kandungan dari surat Al-Maidah itu sebuah kebohongan, maka hukumnya haram dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk penistaan terhadap Al-Quran serta yang menyebarkan surat Al-Maidah tersebut pembohong. Sedangkan MUI melihat orang yang kerap menyebarkan surat tersebut tak lain merupakan para ulama. Hasil wawancara merdeka.com dengan Ketua MUI, Maruf Amin mengatakan :

> *"Jadi MUI sudah membuat pendapat mengenai pernyataan Ahok beberapa waktu lalu. Menurut MUI ada penghinaan kepada Al-Quran dan ulama. Dan ulama dianggap melakukan pembohongan."*[1]

Pernyataan sikap MUI telah diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk dijadikan bahan pemeriksaan Ahok atas laporan sejumlah elemen masyarakat. MUI meminta pihak kepolisian mengusut tuntas pelaporan terhadap Ahok tersebut. Berikut kajian resmi MUI terkait pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah:

Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan," Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya," yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

---

[1]Muhamad Agil Aliansyah, "MUI nilai kutipan Ahok tentang surah Al-Maidah hina Al-Quran & Ulama",https://merdeka.com/peristiwa/mui-nilai-kutipan-ahok-tentang-surah-al-maidah-hina-alquran-ulama.html (Rabu, 7 Mei 2017, 11.40)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alquran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Alquran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Setelah kajian resmi MUI terkait penistaan agama yang dilakukan Ahok, beberapa elemen masyarakat melaporkan mantan politisi Golkar ini ke Bareskim Mabes Polri. Sebelumnya Ahok juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkait kasus yang dilakukan oleh Ahok netizen dunia maya juga ikut serta dalam menyuarakan agar Ahok di tangkap. Melihat lambanya pihak kepolisian menangapi kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ribuan massa pada tanggal 14 Oktober 2016 melakukan aksi damai bela Islam I. Aksi tersebut berlangsung damai, meski ada insiden rusaknya taman yang berada di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok menjadi permasalahan yang menyita banyak masyarakat di Indonesia. Joko Widodo selaku presiden RI segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan agar kasus ini tidak sampai meresahkan banyak pihak. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas masalah aksi damai yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Selang sehari, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah. Selain itu presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ikut terkena imbas. Ketua Umum Partai Demokrat ini sempat disebut menjadi salah satu dalang di balik aksi 14 Oktober 2016. Mendengar tudingan tersebut SBY mengelar konferensi press di Cikeas, Jawa Barat pada rabu 2 Oktober 2016. SBY mengatakan dalam konfrensi pers tersebut bahwa aksi 4 November pasti dipicu oleh suatu sebab.[2]

Menjelang Aksi damai bela Islam Jumat 4 November 2016, Kementrian Komunikasi dan Informatika memblokir 11 situs yang diduga mengandung konten Suku, Agama dan Ras (SARA). Pemblokiran beberasa situs yang dianggap dapat memperkeruh suasana ini adalah permintaan dari beberapa instansi terkait, kolaborasi antara pihak kepolisian, BIN (Badan Intelejen Negara) dan laporan warga. Plt Pusat Humas dan Informasi Kominfo Noor Iza, saat diwawancarai CNN Indonesia, tidak

[2]Myrepro.wordpress.com, "Aksi Damai 4/11, Aksi Damai Bela Islam [1/2]", https://myrepro.wordpress.com/2016/11/07/aksi-damai-411-aksi-damai-bela-islam/(Rabu, 7 Mei 2017, 09.34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelak jika penutupan ini memang terjadi jelang aksi demo 4 November 2016 yang akan diikuti setidaknya ratusan ribu umat Islam.[3]

Sebelum Aksi 4 November Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang juga Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Habib Rizieq Syihab, menegaskan bahwa aksi 4 November mendatang adalah aksi konstitusional penegakan hukum terhadap Ahok yang sudah melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Aksi bela Islam pada tanggal 4 November merupakan murni aksi jihad konstitusional bukan aksi SARA, bukan Aksi anti Cina, atau aksi anti Kristen.[4]

Pernyataan Habib Rizieq Syihab juga senada dengan pernyataan ketua FPI DPW Surabaya, Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi:

> *"Ndak ada urusan dengan politik pada aksi damai kemarin murni dari kita umat Islam membela hak Allah, membela Islam. Sesuai dengan nama aksi bela Islam. Kita sama sekali tidak ada urusan dengan politik. la sekarang Misal ada urusan politik berarti kita harus milih dan milah lo. Kita ikut ini gak boleh, ketika itu kan nyampur semua. Bahkan yg saya kagumi dari kalangan non muslim pun ikut bela Islam, tapi dalam hal ini mereka bukan bela Islam nya tapi dalam arti membela ketidak adilan."*[5]

Pada 4 November 2016, aksi unjuk rasa ini kembali diadakan dengan jumlah massa yang sangat besar sekitar ratusan ribu orang. Aksi ini dimulai setelah shalat

---

[3]Sangpencerah.id, "11 Situs Islam Diblokir Sebelum Aksi Damai 4 November", http://sangpencerah.id/2016/11/11-situs-islam-diblokir-sebelum-aksi-damai-4-november.html(Selasa, 6 Mei 2017, 20.12)

[4]Jurnalmuslim.com," Habib Rizieq: Aksi 4 November Bukan Anti Cina Ataupun Anti Kristen, tapi Murni Jihat Konstitusional", www.jurnalmuslim.com/2016/11/habib-rizieq-aksi-4-november-bukan-anti-cina-ataupun-anti-kristen-tapi-murni-jihat-konstitusional.html?m=1(Selasa, 6 Mei 2017, 21.30)

[5] Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumat dan berada di depan Istana Negara sebagai pusatnya. Pada aksi damai ini pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Menkopolhukam, Wiranto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla untuk mendiskusikan jalan keluar terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok.[6] Peserta aksi damai juga menuntut untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan meminta agar Presiden tidak mengintervensi penyelidikan kasus ini. Akan tetapi pada saat itu Presiden tidak berada di istana negara dengan alasan kunjungan untuk meninjau pembangstaunan stasiun kereta api di bandara Soekarno-Hatta.[7]

Pada Aksi Damai 4 November ini terjadi kericuhan yang disebabkan karena massa demo melangar perjanjian pembubaran diri, dalam perjanjiannya para pendemo harus membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB, namun para pendemo bersikeras untuk tetap bertahan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sehingga puncaknya sesuai kumandang adzan Isya, suasana memanas. Di dekat barikade polisi, sekelompok massa yang dihasut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mulai melakukan penyerangan kepada para aparat yang berjaga.[8] Untuk menstabilkan kondisi pihak keamanan mulai menembakkan gas air mata kepada para pendemo. Akibat dari kericuhan ini seorang pendemo meninggal dunia akibat tidak tahan

---

[6] M Iqbal dan Muhammad Taufiqqurahman, "Wapres JK Bertemu Perwakilan Massa Demo 4 November", http://news.detik.com/berita/d-3337818/wapres-jk-bertemu-perwakilan-massa-demo-4-november(Sabtu, 8 April 2017, 11.13)

[7] Lily Rusna Fajriyah, "Demo 4 November, Jokowi Pilih Tinjau Proyek Kereta Bandara", https://ekbis.sindonews.com/read/1152698/34/demo-4-november-jokowi-pilih-tinjau-proyek-kereta-bandara-1478238406(Sabtu,8 April 2017, 11.22)

[8]Mei Amalia R, "Kronologi Demo 4 November: dari Damai hingga Berakhir Ricuh", http://news.detik.com/berita/d-3339694/kronologi-demo-4-november-dari-damai-hingga-berakhir-ricuh(Sabtu, 8 April 2017, 12.14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghirup gas air mata. Masa mulai stabil pada pukul 21.00 WIB dan mulai membubarkan diri.

Terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tepat tengah malam tanggal 5 November 2016 pukul 00.00 WIB, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers di istana negara dan menyatakan sikapnya terhadap kasus penistaan agama atas Ahok bahwa ia bersama kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dalam waktu yang cepat dan juga secara transparan mungkin. Ia juga menambahkan bahwa ada aktor politik yang bermain sehingga menimbulkan kericuhan pada aksi kali ini.[9] Setelah itu pada 15 November 2016, penyelidikan mulai intensif dilakukan dengan memanggil saksi dari para pelapor dan pihak terlapor melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas untuk menentukan status hukum bagi Ahok. Pada 16 November 2016, kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Namun berdasarkan sejumlah pertimbangan, diputuskan bahwa Ahok tidak ditahan di penjara, hanya paspornya ditahan sehingga tidak bisa keluar negeri.[10]

Aksi damai bela Islam tidak berhenti pada 4 November 2016, aksi ini kembali dilakukan pada 2 Desember 2016 atau aksi damai bela Islam III. GNPF-MUI selaku penyelenggara Aksi Damai Bela Islam II kemarin mengungkapkan akan mengadakan

---

[9]Andylala Waluyo, " Presiden Jokowi: Ada Aktor Politik Tunggangi Demo 4 November", http://www.voaindonesia.com/a/jokowi-ada-aktor-politik-tunggangi-demo-/3581778.html(Sabtu, 8 April 2017, 12.47)

[10]Ahmad Romadoni, "Kapolri Sebut 2 Alasan Ini Penyebab Ahok Tidak Ditahan", http://news.liputan6.com/read/2656931/kapolri-sebut-2-alasan-ini-penyebab-ahok-tidak-ditahan(sabtu,8 April 2017, 12.49)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali aksi serupa pada tanggal 2 Desember 2016. Habib Rizieq menyampaikan bahwa aksi ini akan berlangsung dengan super damai karena diadakan dalam bentuk ibadah bersama. Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam. Ketua DPR RI Ade Komaruddin memilih untuk tidak menanggapi aksi tersebut dan meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada para penyelenggara. Sedangkan kapolri, Tito Karnavian mengancam tidak akan mengeluarkan izin untuk aksi tersebut karena khawatir akan ditunggangi. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak penyelenggara dan kepolisian, maka aksi ini dapat berlangsung dengan kegiatan yang berupa berdoa dan melakukan shalat Jumat bersama. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara ini dan disambut hangat oleh para peserta aksi.

Pada tanggal 11 Februari 2017 Aksi Damai Bela Islam kembali terjadi, aksi ini juga disebut Aksi 112 atau Aksi Damai Bela Islam IV. Aksi ini dikoordinasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Berbagai isu simpang siur dimunculkan di media masa yang memunculkan kesan bahwa aksi 112 akan dibatalkan. Akan tetapi pada tanggal 9 Februari 2017, FUI membuat siaran pers mengenai kegiatan aksi 112 yang berisi bahwa kegiatan aksi 112 yang awalnya berupa kegiatan *long march* atau jalan sehat diubah menjadi "Dzikir dan Tausiyah Nasional untuk Penerapan Surat Al-Maidah 51: Wajib Pilih Pemimpin Muslim dan Haram Pilih Pemimpin Kafir".[11] Tidak ada

[11]Belaquran.com, "[PRESS RELEASE] Pernyataan Pers Forum Umat Islam (FUI) Tentang Aksi 112 Spirit 212", http://www.belaquran.com/2017/02/pernyataan-pers-forum-umat-islam-fui.html(Sabtu, 8 April 2017, 19.54)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan aksi 112 karena tidak ada satu Undang-Undang pun yang dilanggar. FUI sudah menyampaikan pemberitahuan sesuai Undang-Undang. Tujuan aksi 112 ini yaitu memastikan dukungan penduduk Jakarta untuk menolak penodaan Al-Quran, menolak kriminalisasi dan penghinaan terhadap ulama, menjaga pilkada yang jujur dan adil, dan mewajibkan memilih kepala daerah yang muslim.

Aksi Damai ini kembali terjadi pada tanggal 21 Februari 2017 atau disebut Aksi 212 dan ini merupakan aksi damai yang ke V (Lima). Pada aksi ini Imam Besar Front Pembela Islam, Muhamad Rizieq Shihab mengikuti aksi ini. Dalam aksi ini para pendemo meminta DPR/MPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok. Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak layak tetap dijabat oleh seorang dengan status terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Serta meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, dan meminta apparat penegak hukum menangkap Ahok. Atas tuntutan tersebut, Komisi III DPR RI akan meneruskan kepada pimpinan DPR untuk dapat diteruskan kepada Presiden, serta melaporkan kepada kapolri, Jendral Tito Karnavian pada rapat kerja dengan Komisi III, 22 Februari 2017.[12]

Aksi Damai Bela Islam tidak hanya berhenti di situ, pada tanggal 31 Maret 2017 Forum Umat Islam dan diikuti oleh berbagai kelompok organisasi masa Islam ini melakukan Aksi 313 dengan melakukan *long march.* Pada aksi ini masa 313

[12]Muhammad Ali, "3 Tuntutan Massa Aksi 212 di DPR", http://news.liputan6.com/read/286270/3-tuntutan-massa-aksi-212-di-dpr (Sabtu, 8 April 2017, 19.47)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggelar orasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Aksi damai untuk menuntut kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok setelah aksi 31 Maret 2017 masih saja berlanjut, pada tanggal 5 Mei 2017 aksi damai bela Islam kembali terjadi atau disebut aksi simpatik 505. Aksi damai bela Islam ini merupakan buntut dari kekecewaan masa terhadap tuntutan yang diajukan panel jaksa penuntut umum (JPU) kepada Ahok. Mereka menilai adanya sinyal kejanggalan dalam proses hukum Ahok. Massa aksi simpatik 505 meminta agar majelis hakim yang mengadili kasus Ahok dapat bersikap tegas dan independen dalam menentukan vonis kepada Ahok 9 Mei 2017 mendatang.[13]

Gambaran umum aksi damai bela Islam yang terjadi begitu panjang juga dijelaskan oleh sekertaris FPI DPW Surabaya mengenai bagaimana kondisi pada waktu aksi damai, Abdul Wahid Murtadlo mengatakan:

> *"Owhh sampean masyaallah kekompakan dan persaudaraan di sana itu masyallah, ndak pernah kita bayangkan di sana nyampek Istiqlal nyambutnya masyaallah. Sudah masuk terus "ayo-ayo yang belum makan" itu dari segi konsumsi ya kita di jamin, yang kedua itu setelah lain dari konsumsi yang disediakan, kita mau keluar banyak kok*

---

[13]Yudhistira Dwi Putra, "Aksi Simpatik 55 Menjadi Aksi Bela Islam Terakhir", http://news.okezone.com/read/2017/05/05/338/1684272/aksi-simpatik-55-menjadi-aksi-bela-Islam-terakhir (Kamis 18 Mei 2017, 18.53)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *pedagang-pedagang yang digratiskan. Ada yang kayak orang dermawan di borong satu rombog dibayar semua terus di gratiskan ke peserta. Kalau masalah konsumsi di aksi damai ini gak kekurangan kok, cumak kita anunya di situ itu persaudaraanya itu lo, jadi dari mana pun daerah mana pun sudah gumpul disitu satu tujuanya penjarakan Ahok si penista agama wes itu tok ndak ada yang lain, mau yang lain ngomong kita mau dari mana dari mana wes ndak ada itu mbk, satu sudah itu yang bikin saya kagum, ndak pandang. Bahkan banyak kok orang cina yang hadir, etnis2 tionghoa Islam muslim yang hadir itu banyak, bahkan pada aksi 212 ada orang kafir yang hadir ikutan."*[14]

Dari hasil wawancara dengan sekertaris FPI DPW Surabaya dapat dilihat bahwa aksi damai bela Islam yang berlangsung di Jakarta memiliki kesan tersendiri untuk sekertaris FPI DPW Surabaya khususnya dan untuk seluruh FPI yang ada di Indonesia secara umumnya. Melihat pendapat dari sekertaris FPI DPW Surabaya Nampak bahwa mereka sangat senang dengan adanya aksi damai bela Islam karena dengan adanya aksi tersebut mereka merasa aspirasinya dapat direalisasikan.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh sekertaris FPI DPW Surabaya, yakni:

> *"...persaudaraan dan semangat mereka itu jarang saya temukan bahkan di sini ada aksi-aksi tapi di Jakarta masyaallah. Ini kalau gak ada halangan penghadangan itu malah lebih banyak lagi. Sampai yang Jamaah ciamis itu sejarah itu, berjalan sampai 300 KM lebih itu ciamis Jakarta. Siapa tokoh yang bisa mengerakan itu, gak ada kalau ndak kekuatan Allah SWT, jamaah dari padang yang booking satu pesawat itu ramai di medsos, itu semua satu tujuanya untuk kejayaan Islam."*[15]

Aksi Danai Bela Islam yang terjadi sangat luar biasa, dan terjadi begitu damai memang menyita banyak kalangan. Salah satu organisasi masa yang ikut berperan

---

[14] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara,* Surabaya, 29 Mei 2017.
[15] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara,* Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif dalam aksi tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI), selain FPI pusat perwakilan wilayah Surabaya juga ikut serta dalam aksi damai bela Islam yang terjadi begitu damai. Hal ini disampaikan oleh ketua FPI DPW Surabaya, Habib Mahdi:

> *"Ohh yaa jelas kita ikut, wonk kita yang punya gawe kok. Kita full kita kirim kesana. Alhamdulillah waktu aksi-aksi bela Islam pertama 411 ya gak terlalu banyak sekitar 15 bus yang banyak ketika 212 sekitar 90 bus, itu Surabaya saja. Kalo total Jawa Timur sekitar 300 bus."*[16]

Dari hasi wawancara di atas terlihat bahwa antusias FPI DPW Surabaya untuk mengikuti aksi damai bela Islam ini sangat besar. Hal ini juga diperjelas oleh Habib Mahdi mengenai antusias FPI DPW Surabaya dalam mengikuti aksi damai bela Islam. Habib Mahdi mengatakan bahwa:

> *"Ya sangat-sangat positif sangat bagus karena itu bukan aksi damai kita saja, itu aksi damai seluruh umat Islam, cumak ya memang istilahnya yang memotor nya itu Habib Rizieq dari kita. Cuma ketika itu Habib Rizieq yang ketika memotori aksi bela Islam bukan sebagai ketua FPI melainkan sebagai ketua Pembina GNPF-MUI, ketua umumnya Bahtiar Nasir dan tapi memang sebagian besar yang hadir di sana memang orang anggota FPI."*[17]

Dari hasil wawancara dengan ketua umum FPI DPW Surabaya tampak bahwa FPI DPW Surabaya sangat senang dan menyambut dengan positif terkait aksi damai tersebut. Karena aksi damai bela Islam tersebut merupakan sebuah aksi untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ahok itu salah, dan bukan ranah Ahok untuk membicarakan hal itu.

---

[16] Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2017.
[17] Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari ketua umum FPI DPW Surabaya, sekertaris FPI DPW Surabaya juga menilai bahwa aksi damai bela Islam ini merupakan sebuah aksi yang dilakukan umat muslim karena tersinggung dengan perkataan Ahok, sekertaris FPI DPW Surabaya, Abdul Wahid Murtadlo:

> *"Gini mbk aksi bela Islam itu siapa seh yang namanya muslim pasti tersinggung dengan apa yang dilontarkan oleh Ahok. Yang merasa muslim saya yakin pasti tersinggung. Karena bukan ranahnya dia untuk membicarakan, kalau tidak tersinggung patut di pertanyakan. Buya Hamka saja ngomong kalau agamamu di nodai tapi kamu tidak ada hirau maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Artinya di suruh mati saja kalau gak ada faedahnya. Itu dan memang dari awal GNPF-MUI sudah menyebutkan dari awal bahwa ini perkara bukan perkara politik dan bukan perkara yang lain, ini murni perkara agama."*[18]

Pendapat mengenai aksi damai bela Islam juga disampaikan oleh Wali Laskar FPI DPW Surabaya Ustad Agus Fahrudin yang juga merasa sangat senang dengan adanya aksi damai ini:

> *"Ini kan asal muasalnya karena si penista agama ini koar-koar di media sosial sebelum-seblum itu kan dia seakan-akan pongah, sombong, seakan-akan tidak tersentuh hukum. La kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menegur si penista agama ini, akhirnya di plesetkan omonganya padahal sebelumnya sudah lama sebelum kejadian kepulauan seribu itu dia sudah pernah mengatakan yang seperti itu, sudah pernah nulis dibukunya tapi adem ayem, karena Allah mungkin masih melihat oh orang ini ya mungkin sifat manusianya masih salah ndak papa lah tapi lama lama lama kok kelihatanya sombong, akhirnya di tabrakan sekalian. Akhirnya mencuat Buni Yani lapor, uplod di youtube. Asal muasalnya seperti itu, jadi kita umat Islam yang setiap hari melihat di media TV maupun di media cetak kepongahanya orang ini, akhirnya memuncak. Owh jadi kamu memang*

[18] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *selama ini istilahnya memang dari sifatnya dia memang seperti itu, la kena kasus ini kita ya malah seneng."*[19]

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka bukan hanya dari satu pihak saja yang merasa senang dengan adanya Aksi Damai Bela Islam tersebut. Dari pihak ketua, sekertaris dan anggota FPI DPW Surabaya yang kebetulan menjabat sebagai Wali Laskar merasa senang dan sangat mendukung dengan adanya Aksi massa yang begitu banyak dan berjalan begitu damai.

FPI DPW Surabaya sangat berantusias sekali dengan adanya aksi damai bela Islam, mereka menjelaskan bahwa aksi damai bela Islam ini merupakan sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan oleh umat muslim yang merasa agamanya telah dinodai, sehingga mereka sangat senang dan menyambut dengan positif adanya aksi damai ini. Dengan adanya aksi damai yang dipelopori oleh GNPF-MUI, maka umat muslim yang tergabung dalam sebuah organisasi Islam yaitu FPI DPW Surabaya mendeskripsikan aksi damai bela Islam ini merupakan sebuah representasi dari mereka yang tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seperti yang telah disampaikan oleh sekertaris FPI DPW Surabaya Abdul Wahid Murtadlo yang mengutip kisah nabi Ibrahim:

> *"Pernah di ceritakan di Islam yang mengenai nabi Ibrahim di bakar, burung pipit dan cicak. Burung pipit yang paruhnya kecil ngambil air untuk memadamkan api sedangkan sebelahnya cicak yang tetap meniup-niup agar apinya semakin besar. Ditanya cicak kenapa kamu paruhnya kecil kok ngambil air ndak akan ngefek, bakalan sia-sia. Sedangkan*

[19] Agus Fahrudin, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *burung pipit menjawab saya Cuma pingin Allah itu tau saya berpihak dimana, walaupun usaha saya gagal yang penting Allah itu tau saya berpihak dimana."*[20]

Dari hasil wawancara dengan sekertaris FPI DPW Surabaya maka dapat dilihat bahwa FPI DPW Surabaya mengikuti aksi damai bela Islam itu karena ingin memperlihatkan bahwa FPI DPW Surabaya berpihak kepada kebenaran bahwa apa yang telah dikatakan oleh Ahok adalah sebuah penistaan agama. Sedangkan negara Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum dalam setiap kehidupan masyarakatnya, maka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok juga harus diproses dalam jalur hukum, karena telah melakukan penodaan suatu agama.

Dari data diatas maka Aksi Damai Bela Islam yang merupakan sebuah aksi massa untuk menuntut keadilan atas perkara yang telah dilakukan oleh Ahok ini adalah bagian dari gerakan sosial. Berikut adalah hasil analisis dengan teori:

Tabel 4.1

Hasil Analisis dengan Teori

Aksi Damai Bela Islam sebagai Bentuk Gerakan Sosial

Jenis Gerakan Sosial	Aksi Damai Bela Islam
Gerakan Reformasi: Gerakan yang bertujuan untuk mengubah beberapa norma, biasanya norma	Dalam Aksi Damai Bela Islam jika dilihat pada ruang lingkup gerakan sosial disini tergolong dalam gerakan reformasi, yang mana seperti dijelaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mengubah beberapa norma, biasanya norma hukum. Selain itu

[20] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum.	Spencer dalam buku Oman Sukmana Konsep dan Teori Gerakan Sosial juga berpendapat bahwa gerakan reformasi ditujukkan untuk mengoreksi atau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul.[21] Demikian juga pada Aksi Damai Bela Islam dalam penelitian ini termasuk gerakan sosial reformasi berdasarkan ruang lingkupnya. Dalam hal ini Aksi Damai Bela Islam ada karena umat muslim merasa tersinggung dengan apa yang telah dikatakan oleh Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51, yang mana dalam perkataan Ahok tersebut tergolong menistakan agama sehingga umat muslim mendesak untuk segera memproses ke jalur hukum.[22]
Gerakan Fokus Berkelompok: Gerakan yang bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya.	Dalam target gerakanya, gerakan Aksi Damai Bela Islam termasuk dalam gerakan sosial fokus berkelompok. Karena pada gerakan Aksi Damai Bela Islam terdapat beberapa kelompok organisasi masyarakat yang turut berperan dalam aksi tersebut hingga berlangsung dengan damai.
Gerakan Damai: Gerakan yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan.	Gerakan sosial damai termasuk ciri dari gerakan Aksi Damai Bela Islam. Hal ini dapat dilihat pada saat terselenggaranya Aksi tersebut yang berjalan dengan tertib, damai serta kekompakan dan persaudaraan antar peserta aksi yang sangat terasa.[23] Meskipun pada aksi tersebut ada kericuhan tapi itu berasal dari

[21] Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 18.
[22] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.
[23] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	oknum-oknum yang tidak suka dengan adanya aksi tersebut.
Gerakan Baru: Gerakan yang dimulai pada sekitar abad ke-20, dan merupakan gerakan pembaru dari gerakan lama.	Gerakan Aksi Damai Bela Islam merupakan gerakan yang termasuk dalam gerakan sosial baru, dimana gerakan ini muncul sekitar abad ke-20. Gerakan ini muncul pada tahun 2016-2017, yang mana gerakan ini muncul akibat dari umat Islam yang tersinggung dengan apa yang telah dikatakan oleh Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51 dan aksi ini juga dilatarbelakangi oleh pihak penegak hukum yang tidak segera memenjarakan Ahok.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Aksi Damai Bela Islam termasuk dalam bentuk gerakan soaial. Gerakan ini termasuk kedalam gerakan sosial baru, hal ini dapat dilihat dari kemunculan dari gerakan Aksi Damai Bela Islam tersebut. Gerakan sosial yang ada didalam Aksi Damai Bela Islam ini menginginkan sebuah keadilan dari pihak penegak hukum agar segera memproses kasus Ahok dan segera dipenjarakan atas apa yang telah diperbuat. FPI DPW Surabaya mendeskripsikan bahwa aksi damai bela Islam yang telah dilakukan merupakan sebuah representasi atas apa yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang telah melakukan penistaan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Relasi Agama dan Politik dalam Aksi Damai Bela Islam Perspektif FPI (Front Pembela Islam) DPW Surabaya

Agama dan politik terutama Islam merupakan suatu yang sampai sekarang masih di perdebatkan di kalangan para pakar tentang apakah Islam mencakup aspek politik, ataukah Islam hanya mengurusi soal akhirat saja, dalam artian hanya memperhatikan hubungan makhluk dengan Tuhannya. Beberapa pendapat para pakar seperti Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.[24] Pendapat Abid al-Jabiri mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang hanya mengurusi masalah ibadah seperti salat, zakat, haji, dan lain-lain yang sama sekali tidak ada hubunganya dengan masalah politik.

Konsep negara Islam menurut Yusuf al-Qordlawi adalah negara yang berdiri atas asas syariah yang menjamin kebebasan individualnya serta memberi hak pada rakyat untuk andil di bidang politik, baik untuk melihat calon yang mereka ridai ataupun untuk dicalonkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam. Bahkan Islam membolehkan seorag wanita dicalonkan untuk menjadi anggota dewan asalkan memenuhi syarat dan tidak meninggalkan tugas utamanya, yaitu sebagai ibu dan seorang istri.

Karakteristik Negara Islam menurut Yusuf al-Qardlawi adalah sebagai berikut: *pertama*, Negara Islam adalah Negara Madani yang berhukum dengan hukum Islam yang berdiri atas dasar baiat dan musyawarah, yang memilih tokoh-

[24] Abdul Qodim Zallum, *Sisitem Pemerintahan Islam* (Bangil: al-Izzah, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokohnya dari setiap orang yang mampu dan dapat dipercaya, bisa menjaga amanat, cakap. *Kedua,* Negara Islam bukan negara etnis atau kedaerahan, ia tidak berdiri atas dasar batas tanah, atau batas geografi. Ia merupakan negara terbuka bagi setiap orang mukmin dengan dasar kebebasan dan tidak ada paksaan. Ia adalah negara Internasional karena mempunyai risalah Internasional.[25]

Ketiga, Negara Islam adalah negara (perundang-undangan) atau Syariah yang mempunyai undang-undang yang mengatur dan sebagai rujukan. Perundang-undangan ini tercermin pada dasar-dasar dan hukum syariah yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah nabi dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, interaksi pribadi dan madani, pidana dan perdata, serta perundang-undangan Internasional. *Keempat,* Negara Islam berdiri di atas dasar-dasar demokrasi, tetapi bukan negara demokrasi ala Barat. Ia sesuai dengan demokrasi barat pada masalah pemilihan pemimpin dan pada masalah tanggung jawab seorang pemimpin didepan Dewan dan pengambil kebijakan, hingga mereka mempunyai hak untuk memecat pemimpin ketika dia menyeleweng dan tidak mendengarkan nasihat. *Kelima,* Negara Islam adalah negara *Hidayah* bukan *Jibayah* (penarik pajak). Maksudnya misi terbesarnya adalah menyebarkan Islam di dunia, dan menyampaikan risalahnya di berbagai tempat.[26]

Keenam, Negara Islam adalah negara yang melindungi hak-hak kaum lemah, bukan melindungi kepentingan kelompok yang kuat. Ia mewajibkan zakat dan

---

[25] Ibid., 11.
[26] Moh.Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambilnya dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir. Dan juga bagian yang diberikan dari hasil negara yang lain seperti *fai* dan yang lainya. Bagian-bagian untuk yatim, orang miskin dan *Ibn Sabil. Ketujuh,* Negara Islam adalah negara yang kaya akan dasar-dasar dan akhlak yang dijadikan referensi.

Yusuf al-Qardlawi menyebutkan karakteristik negara yang dibangun oleh Islam, ia adalah Negara Madani yang refrensinya Islam bukan negara agama seperti yang difahami dan didefinisikan oleh Barat dalam sejarah mereka. Islam tidak pernah mempunyai konsep tentang negara secara detail dan pasti bahkan menurut Amin Rais Al-Quran dan Sunnah tidak memerintahkan pendirian Negara Islam, tetapi keduanya memberikan etika yang jelas untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik.

Para pemikir dan aktivis politik Islam Indonesia modern sadar akan kesesuaian ajaran-ajaran Islam dengan prinsip-prinsip kehidupan kenegaraan yang demokratis. Generasi pemikir dan aktivis Islam awal seperti Mohammad Natsir sadar benar akan hal ini. Karenanya sebagian besar perjuangan politiknya diarahkan untuk merealisasikan gagasan tentang konstruk negara dan mekanisme penyelenggaraannya yang bertumpu pada asas teo-demokrasi. Kata “teo” yang dikenakan atau ditambahkan pada kata “demokrasi” muncul pertama-tama karena ketaatan Natsir terhadap ajaran agamanya: Islam.[27]

---

[27] Ahmad Gaus AF dan Komarudin Hidayat, *ISLAM, NEGARA & CIVIL SOCIETY Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia mengalami kehidupan politik demokrasi untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kehidupan politik demokrasi itu hanya berlangsung antara 1950-1959. Lemahnya prasyarat sosial ekonomi dan infrastruktur ikut mempengaruhi pendeknya usia demokrasi. Demikian pula, tipologi elit politik nasional yang ada belum tertransformasikan dari *disunified elite* ke *consensually unified eliete* yaitu suatu kondisi yang menyulitkan tercapainya kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan di antara mereka. Semuanya itu ikut menambah daftar kendala bagi kehidupan politik yang demokratis di Indonesia.

Meskipun hanya wacana mengenai tema Islam dan demokrasi hal itu menunjukkan pentingnya posisi agama dalam kehidupan negara, sosial, ekonomi maupun politik. Ini berarti hampir-hampir mustahil memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan negara. Pernyataan demikian hendaknya tidak disalah mengerti sebagai keinginan untuk "menyatukan" antara agama dan negara. Pernyataan itu sekadar hanya untuk dimaksudkan untuk menunjukkan betapa sulitnya (mustahilnya) suatu kegiatan keduniawian sepenuhnya terbebaskan langsung ataupun tidak, sadar ataupun di bawah sadar dari pengaruh nilai-nilai agama.[28]

Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa antara wilayah agama denagn wilayah dunia tidak dapat dibedakan. Identifikasi atas watak dan karakter masing-masing domain persoalan tetap diperlukan. Dengan demikian, diagnose dan penanganan terhadap persoalan yang mungkin timbul dapat dilakukan dengan tepat karena masalahnya jelas dan tidak bercampur. Meskipun diawali dengan membaca

[28] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata yang berasal dari ajaran agama, kegiatan makan atau minum tetap merupakan domain aktivitas dunia. Sebaliknya, kendatipun memiliki makna sosial yang tinggi, kegiatan membayar zakat atau puasa tetap merupakan aktivitas wilayah kegiatan agama. Dalam kerangka seperti itu, agama tidak dalam pengertian ritus, tetapi dalam pengertian ajaran sosial kemasyarakatan yang tidak lagi menjadi wilayah pribadi, tetapi sudah menjadi domain publik. Inilah yang oleh Jose Casanova disebut sebagai konsep "deprivatisasi agama".[29]

Atas dasar itu, politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Islam. Komunitas Islam sendiri tidak mungkin melepaskan kegiatan politik mereka kosong dari pengaruh agama. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa hubungan yang *inexctricable* antara agama (Islam) dan politik atau negara (Indonesia) ini tidak harus mengambil pola yang bersifat *mechanical.* Keduanya dapat berhubungan melalui pola-pola substansialisme atau dekonfensionalisme yaitu suatu kecenderungan yang lebih berorientasi pada makna dan isi.

Dalam konteks hubungan agama dan negara (ulama dan penguasa) dapat dijelaskan dengan prinsip "akomodasi kritis", yaitu prinsip yang menuntut kemampuan para ulama untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan yang integratif terhadap agama. Islam harus dipandang sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain, Islam dalam hal ini difungsikan sebagai faktor integratif yang mendorong timbulnya partisipasi penuh dalam rangka membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan berkeadilan. Agama secara hakiki berhubungan dengan

[29] Ibid., 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum, perbuatan yang oleh rakyat dianggap dosa, seperti sodomi dan incest, sering tidak legal. Seringakali agamalah yang memberi legitimasi kepada pemerintahan. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat dalam masyarakat industri maupun nonindustri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Sedikit atau banyak, sejumlah pemerintahan di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik.

Seperti halnya dalam Aksi Damai Bela Islam yang kita ketahui bahwa latar belakang dari adanya Aksi Damai Bela Islam tersebut adalah pidato yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu yang mengeluarkan pernyataan dengan membawa-bawa surat Al-Maidah ayat 51. Dalam pernyataannya tersebut dinilai banyak kalangan termasuk kedalam penistaan agama, sehingga pernyataan Ahok harus dipertanggung jawabkan dimeja hijau.

Dalam pemrosesan kasus Ahok dirasa kurang tangap dan terlihat lamban dalam menanganinya sehingga umat muslim yang merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Ahok melakukan pemrotesan dengan melakukan Aksi Damai Bela Islam yang terjadi sepanjang kasus Ahok belum dinyatakan bersalah. Sehingga Aksi protes yang dilakukan oleh sebagian umat muslim dan kalangan yang merasa Ahok telah melakukan penistaan ini terjadi berulang kali.

Aksi Damai Bela Islam yang dilakukan untuk menuntut agar Ahok segera di penjarakan ini bertepatan dengan majunya Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sehingga banyak yang menilai bahwa ada kepentingan politik dibalik Aksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Damai Bela Islam. Hal ini juga disampaikan oleh sekertaris FPI DPW Surabaya yang ikut dalam Aksi Damai Bela Islam di Jakarta. Ustad Abdul Wahid mengatakan:

> *"Mustahil lah mbk aksi sebesar itu gak ada yang menunggangi. Cumakan selama ini yang menunggangi gak bikin rusuh dan gak bikin macem-macem jadi ya wes dianggep gak ada."*[30]

Dalam Aksi Damai Bela Islam jika dilihat dari konteks relasi agama dan politik perspektif FPI DPW Surabaya menyatakan bahwa dalam aksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, mereka menegaskan bahwa aksi tersebut murni aksi bela Islam bela Agama. Hal ini disampaikan oleh ketua FPI DPW Surabaya, Habib Mahdi:

> *"Ndak ada urusan dengan politik pada aksi damai kemarin murni dari kita umat Islam membela hak Allah, membela Islam. Sesuai dengan nama aksi bela Islam. Kita sama sekali tidak ada urusan dengan politik. la sekarang Misal ada urusan politik berarti kita harus milih dan milah lo. Kita ikut ini gak boleh, ketika itu kan nyampur semua. Bahkan yg saya kagumi dari kalangan non muslim pun ikut bela Islam, tapi dalam hal ini mereka bukan bela Islam nya tapi dalam arti membela ketidak adilan."*[31]

Dari hasil wawancara dengan Habib Mahdi selaku ketua harian FPI DPW Surabaya dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif FPI Aksi Damai Bela Islam tidak ada sangkut pautnya dengan politik, hal ini murni dari umat Islam membela hak Allah. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh sekertaris FPI DPW Surabaya Ustad Abdul Wahid Murtadlo yang mengatakan bahwa:

> *"...disitu gak ada kepentingan politik sama sekali ndak ada. Entah itu ada oknum yang mau menunggangi ya wawahualam kan itu. Cuma kita kan memang apalagikan intruksinya para petingginya GNPF-MUI bahwa ini aksi memang murni agama, murni penistaan agama, penistaan Al-Quran.*

---

[30] Abdul Wahid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.
[31] Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Entah itu mau orang lain oknum mau menunggangi selama itu tidak menganggu kita punya tujuan ya ndak papa. Mustahil lah mbk aksi sebesar itu gak ada yang menunggangi. Cumakan selama ini yang menunggangi gak bikin rusuh dan gak bikin macem-macem jadi ya wes dianggep gak ada. Kontrolnya masih kalah sama ketua-ketua GNPF-MUI. Akanteapi tambahanya mbk karena emm penistaan itu kepentingan politiknya ahok akhirnya terganggu, luntur dia. Seharusnya dia bisa mulus melangkah untuk mjd gubernur, karena kasus penistaan ini sudah menjadi blockup di Indonesia raya, akhirnya kepentingannya terganggu, akhirnya kalah, akhirnya masuk penjara."*[32]

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota serta bagian dari FPI DPW Surabaya yang ikut serta dalam Aksi Damai Bela Islam, yaitu Ustad Agus Fahrudin:

> *"...ya itu tadi aksi bela Islam itu tadi awalnya gak ada sangkut pautnya sama politik, tapi atas berkat rahmat Allah kepentingan politiknya si penista agama ini tergangu, gagal total istilahnya gatot. Akibat ulahnya dia sendiri, akibat dibukakan sama Allah kalau dalam al-Quran itu Wa makaru wa makarollah Wallahu khoirul makirin, silahkan kamu membuat rencana, makar yang begitu bagus tapi makar allah, rencana Allah jauh lebih dasyat."*[33]

Dari hasil wawancara dengan Wali Laskar FPI DPW Surabaya dapat dilihat bahwa relasi agama dan politik dalam aksi damai bela Islam awalnya tidak ada karena memang murni karena bela agama, sedangkan relasi agama dan politinya disini dapat dilihat dari kepentingan politiknya Ahok sendiri yaitu pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang lalu.

---

[32] Abdul Wachid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.
[33] Agus Fahrudin, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relasi agama dan politik yang tampak pada aksi damai bela Islam tersebut tampak pada adanya kepentingan pada adanya pilkada pada saat itu. Hal ini dijelaskan pada sekertaris FPI DPW Surabaya, yang mengatakan jika adanya ketakutan dari warga Jakarta yang ingin menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Abdul Wahid Murtadlo mengatakan:

> *"Dan sampean tau reaksi masyarakat Jakarta yang di sana pada pemilu putaran pertama mereka mau mencoblos lain itu takut, karena disitu disetiap TPS ada orang merah. Walaupun gak kelihatan tapi mereka ketakutan. Sampai akhirnya itu menag ya walaupun menang nya itu ya kita gak tau ya , yang kita tau nya seperti yang di media seperti itu, nah sampai pada putaran kedua kita melakukan Tamasya Almaidah, itu baru warga masyarakat merasa senang katanya ya Allah Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa orang dari luar kota dari daerah-daerah itu turun semua itu ikut njaga. Jadi warga itu merasa kesenangan ikut senag dan tenang nyoblos, dan itu mustahil mbk kalu ndak curang atau untuk menang itu mustahil karena warga masyarakat situ sudah ndak ada yang mau."*[34]

Pernyataan ini dipertegas oleh Wali Laskar FPI DPW Surabaya yang mengatakan bahwa Ahok sepertinya akan menjadi pemimpin Jakarta, karena dapat dilihat dari *block up* media massa yang sudah dikuasai serta partai politik yang berpengaruh juga sudah dikuasai. Akan tetapi takdir berkata lain, bahwa Ahok kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hal ini dikarenakan kesalahan Ahok yang telah melakukan penistaan agama dan sifatnya yang sombong selama ini. Abdul Wahid Murtadlo mengatakan:

> *"La ini di buktikan seperti ini, lembaga survei awal-awal putaran pertama dengan kondisi ahok yang seperti ini baking nya seperti ini, sarana prasarana sudah dibuat, media sudah mem block up positif*

[34] Abdul Wachid Murtadlo, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *kerjanya si Ahok, tetapi dengan izin Allah kalah, Secara logika saya sendiri secara pribadi ngobrol sama temen-temen gak bisa Anis itu menang gak bisa. Media sudah dia kuasai, duit sudah di kuasai, presiden, kapolri, jaksa agung semua dia pegang, partai politik yang gede-gede golkar PDI PPP PKB dia pegang, logika apapun gak bakalan mungkin Ahok itu kalah. Tapi dengan izin Allah akhirnya pilkada DKI Jakarta Anis yang menang."*[35]

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa perspektif FPI DPW Surabaya mengenai relasi agama dan politik dalam Aksi Damai Bela Islam adalah murni karena penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Meskipun mereka juga membenarkan jika pada aksi tersebut ada kepentingan politik yang menungangi nya. Mereka sadar dan membiarkan hal itu selama tidak merusak dan menganggu apa yang menjadi tujuan FPI dalam aksi tersebut.

Relasi agama dan politik dalam Aksi Damai Bela Islam dapat dianalisis dari konteks agama dilihat dari kasus yang sedang dialami oleh Ahok adalah melakukan penistaan pada surat Al-Maidah ayat 51. Karena mayoritas bangsa Indonesia muslim, maka sensitifitas mereka terhadap agama sangat besar. Apalagi dalam hal ini pelaku adalah seorang pemangku jabatan politik yaitu Plt Gubernur DKI Jakarta dan menjadi calon ketua pada Pilkada pada saat itu. Tidak dapat dipungkiri kepentingan politik dalam Aksi Damai Bela Islam tersebut ada dan kepentingan itu berkaitan dengan adanya Pilkada pada saat itu. Sehingga konteks politik yang dapat dilihat pada aksi damai bela Islam adalah pada akan diselengarakannya pemilihan kepala daerah.

---

[35] Agus Fahrudin, *Wawancara*, Surabaya, 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat peristiwa yang terjadi relasi agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan, mereka selalu berdampingan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, *pertama*, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktifitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama; *kedua*, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang sangat penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id